



KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA

Gender Analysis Pathway (GAP):

Alat Analisis Gender
Untuk Perencanaan
Pembangunan

L12-c/81

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

bekerjasama dengan

KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jakarta, 22 September 2007



KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA

Gender Analysis Pathway (G A P)

**Alat Analisis Gender
untuk Perencanaan Pembangunan**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
bekerjasama dengan
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Jakarta, 22 September 2007

KATA PENGANTAR

Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) dan Tim Konsultan Nasional serta difasilitasi CIDA melalui *Women's Support Project Phase II*, telah mengembangkan suatu alat analisis yang dikenal dengan nama **Gender Analysis Pathway (GAP)** dan **Policy Outlook for Planning (POP)**. Piranti tersebut mempunyai dua komponen, yaitu: (1) komponen analisis dari perspektif gender (GAP) dan (2) komponen melakukan integrasi gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan berdasarkan atas analisis tersebut (POP).

GAP-POP merupakan piranti yang dirancang sejak semula bagi para perencana dalam melakukan keseluruhan proses perencanaan agar kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan menjadi responsif gender.

Untuk pertama kali GAP-POP telah dipresentasikan di forum internasional yaitu pada *International Technical Workshop on Gender Mainstreaming* di Bali pada tanggal 20-25 Februari 2000. Pertemuan tersebut diikuti oleh 4 (empat) negara yaitu Indonesia, Philippines, Bangladesh, dan Canada. Tahun 2001 GAP-POP telah diujicobakan pada 5 (lima) sektor pembangunan, yaitu ketenagakerjaan, pendidikan, hukum, pertanian, serta koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM). Hasil ujicoba GAP-POP di 5 (lima) sektor pembangunan tersebut telah dipresentasikan pada Seminar Nasional Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2001. Tahun berikutnya, 2002, uji coba diperluas ke 4 (empat) sektor lainnya yaitu kesehatan, keluarga berencana, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup. Hasil ujicoba GAP-POP di 9 (sembilan) sektor pembangunan tersebut telah dipublikasikan sebagai *lessons learned* dalam 9 (sembilan) buah buku yang terpisah.

Lebih dari 8 (delapan) tahun sejak GAP-POP dikembangkan, telah disosialisasikan dan diaplikasikan melalui pelatihan-pelatihan pada hampir semua sektor pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Bahkan di tahun 2004, GAP-POP diperkenalkan di Pemerintahan Timor Leste, melalui pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh UNIFEM dalam rangka menopang pelaksanaan *gender mainstreaming* dalam perencanaan pembangunan Timor Leste.

Dalam perjalanannya tersebut terdapat banyak *lessons learned* yang dapat dipetik serta masukan-masukan yang berharga dari para ahli, para fasilitator maupun dari peserta pelatihan, yang terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu di sini. Hasilnya adalah buku edisi baru yang telah disempurnakan (Edisi Revisi), dengan menggunakan metode yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan *user friendly*.

Dengan terbitnya buku ini, kami ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat baik dari Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bappenas khususnya DR. Yohandarwati, MA dan DR. Ir. Subandi, dan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan khususnya Dr. Ir. Hertomo Heroe, Dr. Ir. Pribudiarta NS, Indra Gunawan, SKM, MPH, dan staf Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan atas partisipasi dan kontribusinya. Ucapan yang sama saya sampaikan pula kepada DR. Yulfita Raharjo, MA dan Dr. Nardho Gunawan, MPH yang secara konsisten mengaplikasikan piranti GAP-POP; dan berdasarkan atas pengalamannya telah menjadi masukan berharga untuk perbaikan GAP Edisi Revisi ini. Secara khusus, terimakasih dan penghargaan ingin saya sampaikan kepada Lenny N. Rosalin, SE, MSc yang menjadi 'motor' dari semua kerja ini, sejak GAP-POP mulai dirancang sampai terbitnya Edisi Revisi ini.

Kami menyadari bahwa GAP-POP masih harus terus diuji dan disempurnakan. Kata orang bijak "*tak ada gading yang tak retak*". Semoga dapat bermanfaat.

Jakarta, 22 September 2007
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
dan Kebudayaan – Bappenas

Dra. Nina Sardjunani, MA

KATA SAMBUTAN

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional mengamanatkan bahwa semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota harus melakukan pengarusutamaan gender agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi/aspek gender, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai pelaku yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan.

Analisis gender merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pengarusutamaan gender. Analisis gender mengacu kepada cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan dampak pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki. Untuk itu dalam melakukan analisis gender diperlukan alat analisis (*tool*) yang dapat membantu perencana dan pelaksana secara mudah dan efektif menemukenali isu-isu gender dan merekomendasikan solusinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, atas nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan saya menyambut baik atas diterbitkannya buku *Gender Analysis Pathway* (GAP) Edisi Revisi ini. Buku ini diharapkan menambah referensi piranti analisis gender, yang memiliki langkah-langkah yang lebih efektif dan dipahami secara mudah bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan pihak-pihak lain di dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar responsif gender.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis dan semua pihak yang telah berinisiasi untuk menyempurnakan hingga terbitnya buku GAP Edisi Revisi ini.

Akhirnya semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terkait dan membawa kemajuan bagi pembangunan pemberdayaan perempuan guna terwujudnya kesetaraan gender di masa yang akan datang

Jakarta, 22 September 2008
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender



Dra. Sri Danti, MA

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| KATA SAMBUTAN | v |
| DAFTAR ISI | vii |

BAB I

| | |
|---|---|
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Konsep dan Definisi | 2 |
| 3. Siapa yang Harus Melakukan Perencanaan yang Responsif Gender dan Dimana? | 5 |
| 4. Kapan Perencanaan yang Responsif Gender Harus Dilakukan? | 5 |
| 5. Mengapa Harus Melakukan Perencanaan yang Responsif Gender? | 5 |
| 6. Bagaimana Melakukan Perencanaan yang Responsif Gender? | 6 |

BAB II

| | |
|---|---|
| ALUR KERJA ANALISIS GENDER (<i>GENDER ANALYSIS PATHWAY – GAP</i>) | 7 |
|---|---|

BAB III

| | |
|---------------|----|
| PENUTUP | 14 |
|---------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui pilihan-pilihan (pemilihan) alternatif tindakan yang rasional, efisien, dan efektif. Perencanaan dilakukan baik pada tahapan perencanaan kebijakan dan/atau perencanaan program dan/atau perencanaan kegiatan di berbagai bidang pembangunan, serta di berbagai tingkatan pemerintahan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Sejalan dengan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi dalam dekade terakhir ini, seperti perubahan-perubahan dari kondisi: (a) sifat pemerintahan yang otokratik ke demokratik; (b) sifat pemerintahan yang monolitik ke pluralistik; (c) sifat pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik; (d) sifat pemerintahan yang unilateral (peran pemerintah dan masyarakat) ke interaksionis (peran pemerintah bersama masyarakat); dan (e) sifat pemerintahan yang internal (hanya untuk kepentingan organisasi pemerintah) ke eksternal (disertai dengan peningkatan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan penyerahan sebagian tugas pelayanan dari pemerintah ke masyarakat). Kesemua hal tersebut juga berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat (madani) sebagai wujud sistem tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam arti demokratis, berkeadilan, terdesentralisasi, transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif.

Dalam perkembangan tersebut, rencana pembangunan lima tahun, yang sebelumnya adalah Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, berubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. Dalam RPJMN Tahun 2004-2009 pengarusutamaan gender telah terintegrasi ke dalam Bab 12 tentang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Selain itu, juga terdapat di 13 Bab lainnya, antara lain bab-bab tentang pendidikan, kesehatan, hukum, dan ketenagakerjaan. Untuk pertamakalinya pula, RPJMN Tahun 2004-2009 secara tegas menetapkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan nasional.

Sejalan dengan perkembangan itulah, kehadiran GAP-POP sebagai piranti analisis gender dan pengintegrasian gender ke dalam proses perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi sangat relevan.

2. Konsep dan Definisi

Perencanaan kebijakan adalah perencanaan yang dilakukan untuk menyusun rencana kebijakan (jangka menengah/setiap lima tahun, atau jangka pendek/setiap tahun) yang dibutuhkan sebagai bagian dari tata laksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perencanaan kebijakan dilakukan pada setiap tingkatan pemerintahan meliputi:

- a. Pada tingkat **nasional**, direncanakan/dirumuskan kebijakan makro dan mikro nasional, yang berupa penetapan tujuan dan sasaran pembangunan nasional;
- b. Pada tingkat **provinsi**, direncanakan/dirumuskan kebijakan makro dan mikro regional, yang berupa penetapan tujuan dan sasaran pembangunan provinsi;
- c. Pada tingkat **kabupaten/kota**, direncanakan/dirumuskan kebijakan makro dan mikro daerah, yang berupa penetapan tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan program adalah perencanaan yang dilakukan untuk menyusun rencana program (jangka menengah/setiap lima tahun atau jangka pendek/setiap tahun) baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi, kabupaten/kota, termasuk desa), berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Pengertian dari perencanaan program di sini mencakup pula **perencanaan kegiatan** pembangunan.

Perencanaan program dilakukan pada setiap tingkatan pemerintahan meliputi:

- a. Pada tingkat **nasional**, disusun program pembangunan yang merupakan operasionalisasi kewenangan pemerintah pusat, termasuk program dalam rangka tugas dekonsentrasi maupun perbantuan;
- b. Pada tingkat **provinsi**, disusun program pembangunan yang merupakan operasionalisasi kewenangan pemerintah provinsi, sebagai pencerminan tugas desentralisasi;
- c. Pada tingkat **kabupaten/kota**, disusun program pembangunan yang merupakan operasionalisasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sebagai pencerminan tugas desentralisasi.

Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengkases dan memanfaatkan intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan itu, yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program atau kegiatan) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator.

Dari lensa gender, ada 4 (empat) faktor yaitu, akses, manfaat, partisipasi dan penguasaan (kontrol) yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan. Untuk itu, para perencana dalam mengembangkan perencanaan pembangunan diminta tanggap terhadap keempat faktor tersebut, dengan selalu mempertanyakan:

- a. Faktor **akses**. Apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan telah mempertimbangkan untuk memberi akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki (keadilan gender) dalam memanfaatkan/memperoleh sumber-sumber daya pembangunan?

Keadilan gender di sini adalah memperhitungkan kemungkinan memberlakukan cara yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses (yang sama). Mengingat relasi gender, peran gender, stereotipi gender yang melekat pada perempuan dan laki-laki, dapat berdampak terhadap pengalaman dan kendala masing-masing dalam meraih akses serta mendapatkan manfaat yang diberikan.

Contoh 1: Akses terhadap tawaran beasiswa sering tidak diambil oleh perempuan karena kendala peran gender dia sebagai ibu terhadap anak-anaknya (yang masih kecil) serta sebagai akibat dari stereotipi gender yang disandangnya sebagai pengurus rumahtangga. Oleh sebab itu dianggap berkeadilan gender, jika kebijakan mengenai kriteria umur bagi perempuan diperhitungkan; atau kebijakan sistem '*sandwich*' yang memungkinkan ia, dapat menjenguk anaknya dari waktu ke waktu.

Contoh 2: Akses sebagai perawat sering terhambat bagi laki-laki, karena terdapat stereotipi gender, yaitu profesi perawat itu identik dengan perempuan. Demikian pula halnya dengan profesi sebagai pengendara kendaraan umum (taxi, bus) yang sering diidentikkan sebagai profesi

laki-laki. Disebut berkeadilan gender jika dalam perencanaan rekrutmen diundang juga pelamar baik laki-laki maupun perempuan.

- b. Faktor **manfaat**. Apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberi manfaat bagi perempuan dan laki-laki?

Sama dengan keterangan yang di atas, yaitu karena peran gender yang berbeda, maka apa yang dianggap bermanfaat bagi laki-laki, belum tentu dianggap bermanfaat bagi perempuan. Demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu kebutuhan serta aspirasi keduanya harus dipertimbangkan. Akan tetapi, karena kebanyakan para perencana adalah laki-laki, maka yang sering terabaikan adalah pertimbangan manfaat bagi perempuan.

Contoh: Telah diputuskan dalam suatu musyawarah desa – yang biasanya dihadiri dan diputuskan oleh laki-laki, bantuan ke desa dipakai untuk pengadaan listrik; padahal berdasarkan urgensi kebutuhannya, sebagai pengelola rumah tangga, perempuan menganggap akan bermanfaat jika bantuan itu berupa keperluan pengadaan air bersih, bukan listrik.

- c. Faktor **partisipasi**. Apakah keikutsertaan/suara masyarakat, terutama kelompok perempuan atau suara perempuan (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan/ terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan? Pada umumnya perempuan/suara perempuan kurang/tidak terwakili karena kendala gendernya, sebagaimana diuraikan di atas.
- d. Faktor **kontrol**. Apakah perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol (penguasaan) yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit, dan sumber daya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki?

Jika dalam melakukan proses perencanaan kebijakan telah mengakomodasi isu gender di dalamnya, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan responsif gender. Demikian halnya dalam proses perencanaan program dan kegiatan, jika dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan, program dan kegiatan tersebut telah responsif gender, maka program dan kegiatan pembangunan yang dihasilkan juga akan responsif gender, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 (RPJMN Tahun 2004-2009) tentang keharusan semua bidang pembangunan dari tingkat nasional maupun daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender.

Apabila perencanaan yang dilakukan pada seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan telah responsif gender, maka diharapkan memberi kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.

3. Siapa yang Harus Melakukan Perencanaan yang Responsif Gender dan Dimana?

Perencanaan pembangunan yang responsif gender (perencanaan kebijakan maupun perencanaan program/kegiatan) harus dilakukan oleh para perencana/pembuat kebijakan dan para perencana program/kegiatan. Perencanaan pembangunan tersebut harus dilakukan di seluruh tingkatan administrasi pemerintahan yang meliputi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

4. Kapan Perencanaan yang Responsif Gender Harus Dilakukan?

Perencanaan kebijakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang dilakukan pada satuan waktu setiap lima tahun sekali (kebijakan jangka menengah, seperti RPJMN/RPJMD/Renstra), dan setiap tahun (kebijakan jangka pendek, seperti RKP/RKPD). Sementara itu, perencanaan program/kegiatan dilakukan setiap tahun dalam rangka menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, perencanaan kebijakan dan perencanaan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dilakukan pada saat yang sama, dan merupakan satu kesatuan proses, sesuai dengan rentang waktu tersebut di atas.

5. Mengapa Harus Melakukan Perencanaan yang Responsif Gender?

Perencanaan pembangunan yang responsif gender harus dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih fokus, berkesinambungan, berkeadilan dan mencapai tingkat kemungkinan keberhasilan yang tinggi (optimal), dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan target sasaran (perempuan dan laki-laki). Perencanaan yang responsif gender dilakukan dalam upaya untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di berbagai bidang pembangunan dan untuk menuju ke kesetaraan. Dengan demikian, tujuan perencanaan yang responsif gender adalah tersusunnya rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan, dan di setiap tingkatan pemerintahan.

6. Bagaimana Melakukan Perencanaan yang Responsif Gender?

Dalam melakukan keseluruhan proses perencanaan kebijakan maupun perencanaan program pembangunan agar responsif gender (termasuk perencanaan kegiatan pembangunan), diperlukan piranti analisis gender. Salah satu alat analisis gender adalah "**Gender Analysis Pathway**" (GAP), atau Alur Kerja Analisis Gender. GAP dirancang untuk membantu para perencana melakukan analisis gender dalam rangka pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun **Policy Outlook for Planning (POP)** yaitu rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

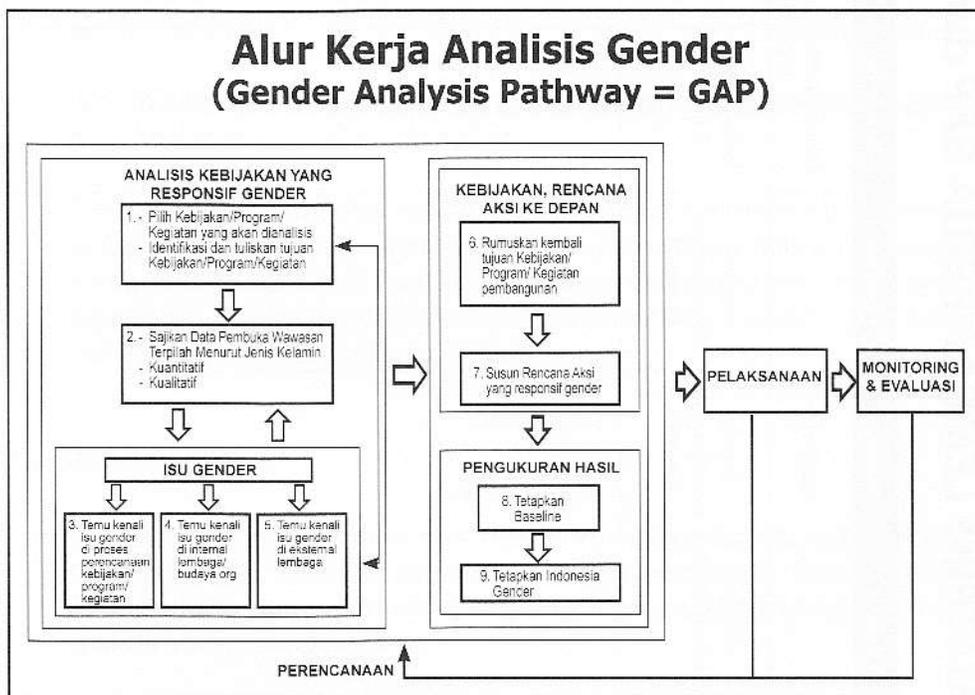
Penjelasan secara rinci dari setiap tahapan dalam melaksanakan GAP-POP diuraikan pada Bab II.

BAB II

ALUR KERJA GAP DAN POP

GAP dan POP merupakan 2 (dua) komponen untuk menghasilkan kebijakan atau program atau kegiatan intervensi yang responsif gender. GAP adalah alat analisis, dan hasil analisis gender tersebut diintegrasikan ke dalam rencana aksi agar menjadi responsif gender (*Policy Outlook for Plan of Action, POP*).

Alur kerja GAP dapat dilihat dalam Diagram berikut ini.



Sebagai lembar kerja untuk melakukan analisis gender digunakan matriks di bawah ini, lengkap dengan langkah-langkahnya. Seperti diterangkan di atas terdapat dua komponen dalam alur kerja GAP, yaitu (1) tahap analisis; dan (2) tahap mengintegrasikan gender ke dalam rencana aksi (POP). Kolom 1 sampai dengan 5 (lihat Matrik Lembar Kerja GAP) adalah tahap analisis gender; dan kolom 6 sampai dengan 9 adalah tahap integrasi gender, hasil dari analisis. Tahapan tersebut dapat dilihat dalam Lembar Kerja *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Policy Outlook for Plan of Action* (POP) berikut ini.

MATRIKS LEMBAR KERJA GAP dan POP

| Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 | Kolom 6 | Kolom 7 | Kolom 8 | Kolom 9 | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Pilih Kebijakan atau Program atau Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Faktor Kesenjangan | Isu Gender | | Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Baseline) | Indikator Gender |
| | | | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tahap I: Analisis Gender (Langkah 1 – 5)

Langkah 1

1. **Pilih kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan yang akan dianalisis. Integrasi gender bisa dilakukan pada kebijakan/program/kegiatan baru (yang akan dibuat atau sedang dirancang) maupun yang sudah ada.**

Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis. Apakah di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Masing-masing tingkat dianalisis secara individual. Misalnya, di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup hanya kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu, yaitu program dan kegiatan.

2. **Identifikasi dan tuliskan di kolom (1) tujuan dari kebijakan atau program atau kegiatan yang akan dianalisis.**

Periksa rumusan/formulasi tujuannya, dan tuliskan rumusan tujuan tersebut di kolom (1). Apabila terdapat beberapa tujuan, maka tuliskan semuanya. Kalau memilih kebijakan yang akan dianalisis, maka yang akan diacu adalah tujuan dari kebijakan tersebut. Demikian pula halnya apabila yang dipilih adalah program atau kegiatan.

Langkah 2

Sajikan di kolom (2) data dan informasi yang relevan, yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan, untuk melihat apakah data dan informasi yang ada memperlihatkan kesenjangan gender yang cukup berarti.

Data pembuka wawasan bisa berupa data dan informasi:

- a) hasil *baseline study* (karena idealnya harus dilakukan kajian/ *assessment/ baseline study* sebelum kebijakan/program/kegiatan dirancang); atau
- b) hasil intervensi kebijakan atau program atau kegiatan yang sedang/ sudah dilakukan.

Jenis data bisa berupa:

- a) data statistik yang kuantitatif: hasil kajian, hasil intervensi, dan/atau data sekunder (BPS, data sektor yang bersangkutan, atau data sekunder lainnya yang relevan); telaah pustaka; atau
- b) data kualitatif: hasil kajian/hasil intervensi, hasil FGD, interview mendalam, hasil observasi, dan kearifan lokal (*local wisdom*).

Penjelasan: Semua data dan informasi yang ditampilkan, apakah memperlihatkan kesenjangan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki? Yang ideal adalah data dan informasi yang ditampilkan tersebut dapat memberikan gambaran sebelum dan sesudah intervensi (kalau intervensi itu telah dilakukan). Akan tetapi jika belum ada intervensi, maka data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin tersebut ditampilkan untuk memberi wawasan dan gambaran kondisi kesenjangan yang harus dipertimbangkan ketika kebijakan, program, kegiatan intervensi diformulasikan dan dirancang.

Langkah 3

Temukenali isu gender di proses perencanaan kebijakan, program atau kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dari empat aspek yang berpotensi sebagai penyebab kesenjangan yaitu, akses, manfaat, partisipasi dan penguasaan (kontrol):

- Apakah kebijakan/program/kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang memberikan akses yang adil terhadap perempuan dan laki-laki?
- Apakah kebijakan/program/kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki terhadap sumber-sumber pembangunan?
- Apakah kebijakan/program/kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang memberikan perempuan dan laki-laki berpartisipasi sama dalam menyuarakan kebutuhan, kendala di berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan?
- Apakah kebijakan/program/kegiatan intervensi pembangunan yang ada atau yang sedang dirancang memberikan penguasaan (kontrol) sumberdaya seperti informasi, pengetahuan, dana, kredit, dst., yang adil dan dengan sama terhadap perempuan dan laki-laki.

Penjelasan: (1). Isu gender bisa muncul sejak tahap perencanaan, sehingga menghasilkan kebijakan/program/kegiatan intervensi yang bias gender; bahkan yang netral gender sekalipun bisa menghasilkan kesenjangan gender. Untuk itu, sejak dalam proses perencanaan selalu memastikan bahwa perempuan dan laki-laki yang menjadi target mendapatkan akses yang adil dan manfaat yang setara; memastikan suara, kebutuhan maupun kendala mereka sebagai perempuan dan laki-laki terakomodasi atau terfasilitasi; serta memastikan keduanya mendapatkan penguasaan terhadap sumberdaya melalui cara yang adil sehingga mendapatkan hasil yang setara. Sumberdaya ini bisa berupa kredit, informasi, pengetahuan, keterampilan, dll, tergantung pada program atau kegiatan intervensi. Contoh: karena peran gendernya, perempuan tidak dapat menghadiri sosialisasi UU PKDRT yang diadakan malam hari; sebab itu diadakan pertemuan di siang hari atau waktu yang tepat untuk perempuan dapat hadir mendengarkan informasi itu. Itulah yang disebut adil gender; masing-masing, baik perempuan dan laki-laki kemudian mendapatkan informasi yang sama (kesetaraan gender). (2) Dalam menganalisis tidak selalu memakai ke-empatnya (akses, manfaat, partisipasi dan penguasaan), tetapi bisa memilih yang relevan.

Langkah 4

Temukenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya lembaga/ organisasi yang (dapat) menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya: produk hukum, kebijakan dari lembaga yang bersangkutan masih netral gender/tidak responsif gender; pemahaman tentang gender yang masih kurang diantara personil (pengambil keputusan, perencana, staf, dan lain lain); dan/atau belum adanya *political will* dan komitmen dari pengambil kebijakan.

Penjelasan: Isu gender bisa dijumpai/berada di internal lembaga dimana kita bekerja, suasana yang tidak mendukung/konduusif; misalnya kurangnya dukungan dari pimpinan; belum tersosialisasinya dengan baik mengenai gender, gender dan pembangunan; belum tersedianya piranti pendukung lainnya seperti data terpilah menurut jenis kelamin, sumberdaya manusia dst.

Langkah 5

Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan.

Apakah dalam tahap implementasi pelaksanaan program tidak peka terhadap kondisi isu gender di masyarakat yang menjadi target program. Apakah kondisi masyarakat sasaran (*target group*) belum kondusif, misalnya masih kental budaya patriarki, dan *gender stereotype* (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga; dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan perempuan atau pekerjaan laki-laki).

Tahap II: Integrasi Gender (Langkah 6 – 9)

Langkah 6

Rumuskan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan, yang terdapat pada Langkah 1, sehingga menjadi responsif gender. Tujuan semula tidak dirubah total, tetapi dengan menyisipkan satu dua kata pada tujuan yang sudah ada.

Contoh (1): Tujuan yang tertera adalah '*menciptakan lapangan kerja*'. Agar menjadi responsif gender, perlu disisipkan kata '*termasuk untuk perempuan*'.

Contoh (2): Tujuannya adalah '*membangun sarana pasar, sekolah dan Puskesmas*'. Agar menjadi responsif gender, ditambah dengan kata '*yang dekat dengan permukiman*'.

Penjelasan: Tidak ada kata '*responsif gender*' atau kata '*perempuan dan laki-laki*' dalam contoh ke-2. tetapi dengan menyisipkan kata '*yang dekat dengan permukiman*'. Isu gender yang harus diperhatikan adalah pasar, sekolah, dan Puskesmas itu sangat '*dekat*' dengan peran gender perempuan.

Langkah 7

Susun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (hasil Langkah 3-5) dan sesuai dengan tujuan kebijakan/program/kegiatan yang telah direformulasi (kolom 6), maka dirancang rencana aksi yang responsif terhadap isu gender.

Penjelasan: Keuntungan dari rencana aksi yang teridentifikasi sebagai hasil dari analisis gender ini lengkap untuk menuju ke kesetaraan gender (sebagai outcome) melalui hasil kegiatan multi tahun. Tahapan kegiatan dapat diimplementasikan per tahun/periode.

Langkah 8

Tetapkan *base-line* yaitu data dasar yang dipilih sebagai suatu titik untuk mengukur kemajuan (*progress*) pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil/dipilih dari data pembuka wawasan (kolom 2), yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.

Langkah 9

Tetapkan indikator gender yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk:

- memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah menghilang atau berkurang (hasil intervensi jangka pendek/tahunan); bertambahnya dan diimplementasikannya kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender;
- memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan dalam budaya internal lembaga dan perilaku pada para perencana kebijakan/program/ kegiatan, dengan melakukan analisis gender sebagai salah satu analisis dalam proses perencanaan; dan
- memperlihatkan apakah terjadi di (masyarakat) kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses dan/atau manfaat dan atau partisipasi dari program pembangunan yang diintervensikan dan/atau penguasaan terhadap sumberdaya dan pada akhirnya terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, dan/atau di masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Perubahan paradigma pembangunan antara lain ditandai dengan jaminan terwujudnya kesetaraan gender sebagai hasil dari upaya pembangunan di semua bidang pembangunan. Untuk itu lembaga pemerintahan, termasuk para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dituntut untuk transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil (kinerja). Salah satu pendekatan untuk terwujudnya kesetaraan gender adalah melalui pengarusutamaan gender (PUG) ke semua bidang pembangun. Oleh sebab itu *by design* arah kebijakan, sasaran maupun agenda program sudah diarahkan ke sana.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dan para *stakeholders* telah melengkapi dengan berbagai piranti pendukung yang diperlukan, antara lain jaminan dari piranti legal, alokasi budget, sumber daya manusia yang terampil, dan juga piranti analisis sebagai bagian integral dari pelaksanaan PUG. *Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah satu dari banyak piranti analisis gender. Kelebihan dari piranti GAP ini adalah bukan saja telah dipakai secara luas dan teruji dalam kurun waktu hampir satu dasawarsa terakhir ini, tetapi yang juga membanggakan adalah bahwa GAP dikembangkan sebagai wujud kerjasama antara perencana, birokrat dan unsur masyarakat madani. GAP lahir dan berkembang menjawab kebutuhan dulu, kini dan masa datang. Untuk itu tidak henti-hentinya GAP disempurnakan.

Sebagai penutup, diharapkan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dapat digunakan oleh para perencana dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender. Dengan melakukan analisis gender, hasil-hasil pembangunan memberi kepastian dapat dinikmati secara adil dan setara. Untuk itu, analisis gender perlu dilakukan di seluruh proses perencanaan pada semua tingkatan, dan pada akhirnya dapat melembaga.

✳